

**APPLYING GOVERNMENT REGULATION NUMBER 71 YEAR 2010
(STUDY EMPIRICAL TO GOVERNMENT OF KABUPATEN LUMAJANG)**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010
(STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG)**

Abdillah Ibrohim Sholeh

211131390

Jurusan Akuntansi

STIE Widya Gama Lumajang

2015

ABSTRACT

This research aimed to determine the readiness of the government of Lumajang in implementing accrual base government accounting standards. Data were collected by observation, in-depth interview with department-head and staff of the finance department at SKPD of Lumajang.

The result were analyzed by the method of data collection using qualitative interpretive approach. The result showed that the readiness the government of Lumajang needed more time to implementing government accounting standar where using accrual base together, this is supported by the government regulation to require all local governments including the government of Lumajang in implementing accrual base. The complexity of the financial statement in government accounting standards where accrual base more a lot than before could to solve with E-finance system also resistant individu to financial statement of Lumajang in undercontrol. Meanwhile, in terms of organization culture goverment of Lumajang must be implementing goverment accounting standards where accual basic. The main major factor make so hard to implementing goverment accounting standards where accrual basic is more kinds of human resource

Keyword : Government accounting standards, accrual basic, the readiness of teh local government.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dengan pimpinan dan pegawai dari bagian keuangan SKPD Kabupaten Lumajang dan studi dokumen.

Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang masih membutuhkan waktu tambahan untuk mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara terpadu, hal tersebut dikarenakan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan yang bertambah pada standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat terbantu dengan adanya sistem *e-finance* sehingga resistensi individu terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat terkendali, sedangkan dari sisi budaya organisasi pemerintah Kabupaten Lumajang diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Faktor utama yang menjadi kesulitan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah sumberdaya manusia yang bervariasi.

Kata Kunci : Standar akuntansi pemerintah, basis akrual, kesiapa pemerintah daerah

